

# STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2017



<https://lampung.bps.go.id>





# STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG **2017**



## **STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 2017**

**ISSN** : 0126 – 4699  
**No. Publikasi** : 18540.1812  
**Katalog BPS** : 7203007.18  
**Ukuran Buku** : 21 cm x 29,7 cm  
**Jumlah Halaman** : xii + 83 halaman

**Naskah:**  
**Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung**

**Penyunting:**  
**Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung**

**Desain Kover oleh:**  
**Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung**

**Penerbit**  
**BPS Provinsi Lampung**

**Pencetak:**  
**CV. JAYA WIJAYA**

**Sumber Ilustrasi: -**

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung**

## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2017, merupakan seri publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang sumber-sumber penerimaan maupun pos belanja pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota. Data yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah data realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 dan tahun 2017 pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.

Sumber data statistik keuangan ini diperoleh dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil survei keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan daerah.

Kritik dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan publikasi ini dimasa mendatang sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, November 2018

BPS PROVINSI LAMPUNG

K e p a l a,



Yeane Irmaningrum S.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I. PENJELASAN UMUM .....	1
1.1. Pendahuluan.....	1
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data.....	2
BAB II. KONSEP DAN DEFINISI.....	5
BAB III. ULASAN RINGKAS .....	13
3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung .....	13
3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung.....	17
3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung.....	18
3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota .....	20
3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	22
3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	23
3.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah Provinsi Lampung .....	23
DAFTAR PUSTAKA .....	83





## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2016 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2017 (Juta Rupiah) .....	15
Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2017 (Juta Rupiah).....	16
Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja, 2016-2017 .....	20
Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2016-2017 (Ribu Rupiah).....	21
Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2016-2017 .....	23
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2016-2017 .....	27
Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2016-2017.....	28
Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2016-2017 .....	29
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2016-2017.....	30
Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2016-2017 .....	31
Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2017.....	32
Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2016-2017 .....	33
Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2017 .....	34
Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2016-2017 .....	35
Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2016-2017.....	36

Tabel 11.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2016-2017 .....	37
Tabel 12.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2016-2017.....	38
Tabel 13.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2016-2017.....	39
Tabel 14.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2016-2017.....	40
Tabel 15.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2016- 2017.....	41
Tabel 16.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2016-2017 .....	42
Tabel 17.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2016-2017 .....	43
Tabel 18.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2016-2017 .....	44
Tabel 19.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2016- 2017.....	45
Tabel 20.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2016-2017.....	46
Tabel 21.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2016-2017 .....	47
Tabel 22.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2017.....	48
Tabel 23.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2016-2017.....	49
Tabel 24.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2017.....	50
Tabel 25.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2016-2017.....	51
Tabel 26.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2016-2017.....	52
Tabel 27.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2016-2017 .....	53
Tabel 28.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2016-2017.....	54
Tabel 29.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2016-2017 .....	55
Tabel 30.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2016-2017.....	56

Tabel 31. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2016-2017.....	57
Tabel 32. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2016-2017.....	58
Tabel 33. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2016-2017.....	59
Tabel 34. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2016-2017.....	60
Tabel 35. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2016- 2017.....	61
Tabel 36. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2016-2017.....	62
Tabel 37. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2016-2017.....	63
Tabel 38. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 2016-2017.....	64
Tabel 39. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2016-2017.....	65
Tabel 40. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2016-2017.....	66
Tabel 41. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2016-2017.....	67
Tabel 42. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2016-2017.....	68
Tabel 43. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2016-2017.....	69
Tabel 44. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2016-2017.....	70
Tabel 45. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2016-2017.....	71
Tabel 46. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2016-2017.....	72
Tabel 47. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2016- 2017.....	73
Tabel 48. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2016-2017.....	74
Tabel 49. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2016-2017.....	75
Tabel 50. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2016-2017.....	76

Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
2016-2017 ..... 77

<https://lampung.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 2017.....	17
Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2017....	19
Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2017.....	22

<https://lampung.bps.go.id>

<https://lampung.bps.go.id>

## **BAB I. PENJELASAN UMUM**

### **1.1. Pendahuluan**

Arah kebijakan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah yang berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, maka pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah tersebut dalam mengalokasikan APBD didasarkan pada program-program pembangunan yang disusun dengan perspektif kedepan sesuai dengan prosedur dan mekanisme mulai dari perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan mengelola membangun daerah. Diantara kemampuan mengelola adalah mengelola APBD yang merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran juga merupakan cermin finansial ekonomi masyarakat serta pilihan masyarakat. Selain itu anggaran belanja lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah. Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk percepatan implementasi program-program unggulan daerah seperti Infrastruktur Penghubung Jawa Sumatera (IPJS), Jalan Tol Terbanggi-Bakauheni, dan lain-lain. Dalam pengelolaannya berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis serta memperhatikan kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung secara umum menyajikan data tentang pendapatan dan belanja pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung selama dua periode tahun anggaran.

Beberapa informasi penting yang dapat diperoleh dari statistik keuangan daerah Provinsi Lampung ini antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
- c. Memberikan informasi bagi pemerintah pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.
- d. Sebagai salah satu indikator bagi swasta ataupun masyarakat untuk menanamkan investasi sesuai dengan potensi yang ada di daerah yang bersangkutan.

## **1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data**

Data statistik keuangan daerah Provinsi Lampung diperoleh dari pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung secara sensus dengan menggunakan daftar K-1 dan K-2.

### **1.2.1. Statistik keuangan daerah tingkat provinsi**

Pencacahan statistik keuangan daerah Provinsi Lampung dilakukan setiap tahun dengan menggunakan daftar K-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

- 1.2.2. Pencacahan keuangan daerah kabupaten/kota dilakukan secara lengkap di seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan menggunakan daftar K-2. Sumber data diperoleh dari bagian keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di masing-masing kabupaten/kota.



### 1.2.3. Jenis daftar isian yang digunakan

#### Daftar K-1

Daftar ini digunakan untuk mencatat data statistik yang menyangkut realisasi keuangan daerah provinsi.

#### Daftar K-2

Daftar K-2 adalah jenis daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang realisasi keuangan daerah kabupaten/kota.

<https://lampung.bps.go.id>



## BAB II. KONSEP DAN DEFINISI

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota adalah realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah sendiri. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- Pajak daerah, adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pendapatan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.
- Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas.

Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, penjualan produksi daerah, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain-lain.

- Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
- Lain-lain PAD yang sah, merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah di bidang tertentu yang meliputi pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, tuntutan ganti rugi, penerimaan lain-lain, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dan pendapatan denda pajak.

Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Bagi Hasil Pajak:  
Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

- Bagi Hasil Bukan Pajak :

Bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH), pemberian hak atas tanah negara, iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, bagi hasil dari cukai tembakau, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

- DAU

DAU adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

- DAK

DAK adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah digariskan.

- Lain-lain pendapatan yang sah, adalah penerimaan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana kontijensi/penyeimbangan/penyesuaian dari pemerintah, dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis *solvability*.

Kebijakan umum belanja daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada kegiatan sektoral yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sesuai Permendagri tersebut telah ditentukan bahwa struktur belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

- Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam belanja pegawai termasuk juga uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota

DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.
- Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota

kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja yang bersifat strategis, dengan nilai yang besar, dapat dilaksanakan dengan menetapkan belanja *multi years* dan/atau *turn key* yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD.

- Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari duabelas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai



nilai manfaat lebih dari duabelas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dengan maksud menutup defisit atas memanfaatkan surplus anggaran.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.



### **BAB III. ULASAN RINGKAS**

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam pembangunan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan, ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dipakai juga sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian APBD harus dirancang untuk mengarahkan alokasi dana yang membiayai berbagai program dan kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan kepuasan publik (*public satisfaction*) sebagai wujud pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga pembangunan daerah yang efektif dan efisien dapat dicapai.

Sejak tahun 2002, kebijakan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dengan diterapkannya sistem anggaran tersebut, maka format APBD juga mengalami perubahan terutama di sisi belanja daerah.

#### **3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung**

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD merupakan gambaran langkah konkret pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan tema pembangunan

tahun 2017 yakni “Memperkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Ekonomi untuk Mengurangi Kesenjangan Antar wilayah Menuju Lampung Maju dan Sejahtera”. Hal tersebut menjadi upaya prioritas untuk percepatan pertumbuhan Provinsi Lampung dan mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam NAWACITA (9 program pembangunan nasional), sehingga pembangunan berjalan sinergi dan penuh koordinasi. Dikutip dari Publikasi PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran 2013 – 2017, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen *year on year* (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh 5,15 persen (yoy).

Untuk itu otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pertama, pemerintah daerah memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan PAD. Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendapatan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontingensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Dalam merumuskan target anggaran pendapatan pemerintah Provinsi Lampung, cenderung menentukan target minimal dari sumber PAD. Dengan adanya kenaikan penerimaan dana perimbangan, maka pendapatan daerah pemerintah Provinsi Lampung tahun 2017 yang ditargetkan sebesar 6,81 trilyun rupiah, lebih tinggi dari penerimaan yang diperoleh pada tahun 2016 yaitu 5,68 trilyun rupiah atau naik 19,83 persen. Karena masih berupa rancangan, maka belum tentu sama dengan realisasinya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Jika perkiraan penerimaan lebih besar dari realisasinya, menyebabkan ada kegiatan yang telah direncanakan diawal tahun tidak dapat diselesaikan atau mungkin

tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran. Hal ini menjadikan kinerja keuangan daerah menjadi kurang baik. (Tabel 3.1).

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2017 dianggarkan mencapai 4,03 trilyun rupiah mengalami kenaikan 27,63 persen dari tahun 2016 yaitu sebesar 3,16 trilyun rupiah. Dana perimbangan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. (Tabel 3.1).

Berdasarkan struktur belanja pemerintah daerah, belanja tidak langsung dianggarkan mencapai 4,46 trilyun rupiah mengalami kenaikan 33,69 persen dari tahun 2016 yaitu sebesar 3,34 trilyun rupiah. Sementara itu, belanja langsung tahun 2017 dianggarkan oleh pemerintah pusat mencapai 2,34 trilyun rupiah naik 9,42 persen dari tahun 2016 yaitu sebesar 2,14 trilyun rupiah. (Tabel 3.1).

**Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2016 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2017 (Juta Rupiah)**

Rincian	Realisasi 2016	Anggaran 2017	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>5 681 234,11</b>	<b>6 807 928,25</b>	<b>19,83</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>5 588 722,51</b>	<b>6 723 785,17</b>	<b>20,31</b>
Pendapatan Asli Daerah	2 368 796,25	2 649 215,47	11,84
Dana Perimbangan	3 158 712,90	4 031 511,70	27,63
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	61 213,36	43 058,00	(29,66)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>92 511,59</b>	<b>84 143,08</b>	<b>(9,05)</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>5 486 921,60</b>	<b>6 807 928,25</b>	<b>24,08</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3 337 212,48</b>	<b>4 461 638,21</b>	<b>33,69</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>2 139 709,11</b>	<b>2 341 290,04</b>	<b>9,42</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>(50,00)</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Perubahan dalam perencanaan anggaran suatu pemerintahan tidak selalu berdampak negatif. Hal tersebut dapat menyesuaikan situasi perekonomian, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, optimalisasi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber penerimaan dapat mencapai target

penerimaan yang telah dianggarkan. Hal ini juga terlihat pada rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2017. Dari rencana penerimaan sebesar 6,81 trilyun rupiah, dalam realisasinya diperoleh 7,02 trilyun rupiah atau mengalami kenaikan 3,09 persen. (Tabel 3.2).

Dari sisi pengeluaran, realisasi pengeluaran daerah lebih tinggi dari yang dianggarkan tahun 2017. Hal tersebut terlihat pada perubahan komponen pendukungnya seperti belanja langsung yang mengalami peningkatan. Realisasi belanja langsung naik 20,39 persen menjadi 2,82 trilyun rupiah dari 2,34 trilyun rupiah yang dianggarkan. Sementara itu realisasi belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar 5,60 persen dari rencana anggaran 4,46 trilyun rupiah menjadi 4,21 trilyun rupiah. (Tabel 3.2).

**Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2017 (Juta Rupiah)**

<b>Rincian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Perubahan (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>6 807 928,25</b>	<b>7 018 067,52</b>	<b>3,09</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>6 723 785,17</b>	<b>6 813 755,01</b>	<b>1,34</b>
Pendapatan Asli Daerah	2 649 215,47	2 750 596,48	<b>3,83</b>
Dana Perimbangan	4 031 511,70	2 643 744,66	<b>(34,42)</b>
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	43 058,00	1 419 413,87	<b>3 196,52</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>84 143,08</b>	<b>204 312,51</b>	<b>142,82</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>6 807 928,25</b>	<b>7 045 414,97</b>	<b>3,49</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4 461 638,21</b>	<b>4 211 701,80</b>	<b>(5,60)</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>2 341 290,04</b>	<b>2 818 713,16</b>	<b>20,39</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>200,00</b>

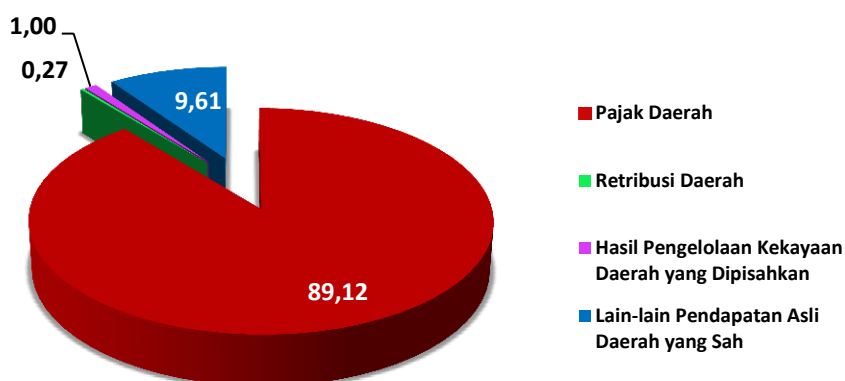
Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

### 3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penerimaan PAD Provinsi Lampung tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 16,12 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu dari 2,37 trilyun menjadi 2,75 trilyun rupiah. (Diolah dari Tabel 3.1 Kolom 2 dan Tabel 3.2 Kolom 3).

Untuk mengukur dan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan wilayahnya dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan yang dapat didefinisikan dengan rasio. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain. Ditinjau dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, Provinsi Lampung pada tahun 2017 dengan rasio sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan sebesar 40,37 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. (Diolah dari Tabel 3.2 Kolom 3).

**Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 2017**



Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Dari Gambar 3.1 tampak bahwa sumber pendapatan asli daerah Provinsi Lampung dari penerimaan pajak daerah tahun 2017 merupakan sumber yang paling dominan yaitu 89,12 persen. Retribusi yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat, hanya memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar 0,27 persen. Rendahnya sumbangan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan daerah bisa terjadi karena pada saat perencanaan pemerintah kurang memiliki informasi sektor mana yang diperkirakan masyarakat akan banyak menggunakan fasilitas/pelayanan pemerintah.

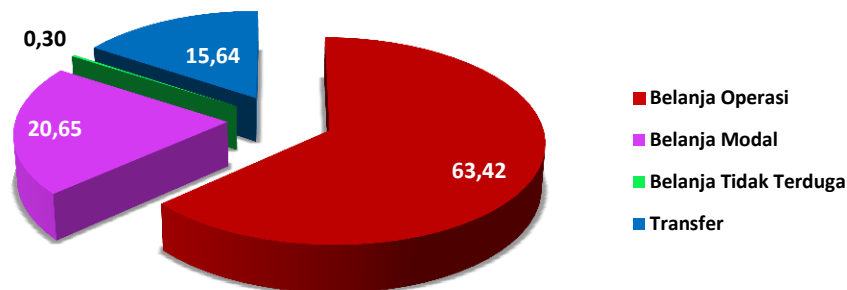
### **3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. Dilihat dari proporsinya terhadap realisasi belanja daerah tahun 2017, belanja operasi mendominasi pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung sebesar 63,42 persen. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor komponen pendukung belanja operasi yang meliputi belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan belanja bantuan sosial yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 75,93 persen dan 74,28 persen. (Gambar 3.2 dan diolah dari Tabel 2).



**Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2017**



Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Seperti halnya pemanfaatan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan baik itu rutin maupun fisik. Hal ini terlihat dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total belanja keseluruhan. Rasio belanja operasi pemerintah Provinsi Lampung tahun 2017 sebesar 63,42 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. (Gambar 3.2).

Dalam mengukur pembangunan infrastruktur, pemerintah Provinsi Lampung masih perlu melakukan perbaikan dan menjadi perhatian. Terlihat dari rasio modal terhadap total belanja yaitu sebesar 20,65 persen. Hal tersebut menunjukkan persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik infrastruktur masih perlu ditingkatkan. (Gambar 3.2).

Dilihat dari kontribusinya, dibandingkan dengan tahun 2016 belanja tidak langsung tahun 2017 mengalami penurunan. Jika tahun 2016 kontribusinya dalam belanja daerah yaitu 60,93 persen, maka tahun 2017 kontribusi belanja tidak langsung yaitu 59,91 persen. Dengan turunnya *share* belanja tidak langsung tahun 2017, hal ini berarti pemerintah cenderung meningkatkan alokasi dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi. (Tabel 3.3)

**Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja, 2016-2017**

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>60,93</b>	<b>59,91</b>
Belanja Pegawai	13,58	24,42
Belanja Hibah	26,49	18,33
Belanja Bantuan Sosial	0,05	0,06
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19,90	15,64
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	<b>0,85</b>	<b>1,16</b>
Belanja Tidak Terduga	0,07	0,30
<b>Belanja Langsung</b>	<b>39,07</b>	<b>40,09</b>
Belanja Pegawai	1,75	0,00
Belanja Barang dan Jasa	18,96	19,45
Belanja Modal	18,36	20,65

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

### 3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Pembentukan daerah otonomi baru/pemekaran daerah kabupaten/kota sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan pemekaran daerah pemerintah akan lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat, semakin memahami kebutuhan masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2017, penerimaan daerah Provinsi Lampung mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2016, penerimaan daerah tahun 2017 naik 4,85 persen dari 21,09 triliun rupiah menjadi 22,11 triliun rupiah. Kenaikan tertinggi diperoleh dari sumber pendapatan asli daerah sebesar 35,56 persen dari 1,43 triliun rupiah menjadi 1,94 triliun rupiah di tahun 2017. (Tabel 3.4).

Dibandingkan dengan penerimaan daerah, pengeluaran daerah tahun 2017 mengalami peningkatan 12,11 persen atau mencapai 22,77 triliun rupiah dari sekitar

20,31 triliun rupiah tahun 2016. Apabila dilihat dari strukturnya, kenaikan belanja tidak langsung mengalami peningkatan hingga mencapai 16,56 persen. Adapun belanja langsung yang terkait dengan program tahun 2017 juga naik 12,77 persen. (Tabel 3.4).

Optimalisasi penggunaan anggaran belanja daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung terhadap realisasi belanja tahun 2017 dapat dilihat dari rasio belanja operasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebesar 73,63 persen menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi tertinggi yaitu Kabupaten Tanggamus sebesar 83,76 persen, diikuti Kabupaten Lampung Timur sebesar 83,14 persen, dan Kabupaten Lampung Utara sebesar 77,63 persen. Sementara itu rasio belanja operasi terendah yaitu Kabupaten Pesisir Barat sebesar 61,18 persen. (Diolah dari Tabel 35).

**Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2016-2017 (Ribu Rupiah)**

Rincian	2016	2017	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>21 091 702 910,19</b>	<b>22 115 268 694,89</b>	<b>4,85</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>19 923 291 593,54</b>	<b>21 224 707 065,40</b>	<b>6,53</b>
Pendapatan Asli Daerah	1 435 883 055,93	1 946 514 939,90	35,56
Dana Perimbangan	15 466 993 681,46	15 232 247 423,16	(1,52)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3 020 414 856,15	4 032 298 720,05	33,50
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1 168 411 316,66</b>	<b>890 561 629,50</b>	<b>(23,78)</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>20 314 449 426,44</b>	<b>22 773 536 885,72</b>	<b>12,11</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>11 124 093 629,59</b>	<b>12 965 997 146,67</b>	<b>16,56</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>8 601 109 202,78</b>	<b>9 699 427 529,07</b>	<b>12,77</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>589 246 594,06</b>	<b>108 112 209,98</b>	<b>(81,65)</b>

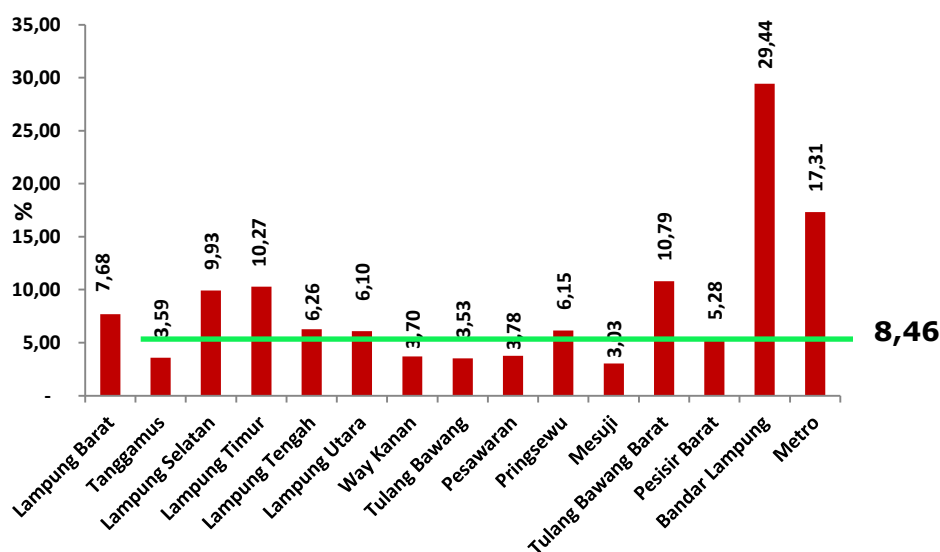
Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

### 3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Dengan adanya pemekaran wilayah, pemerintah kabupaten/kota optimis mampu meningkatkan PAD, hal ini terlihat dari penerimaan pada pos PAD yang naik hingga 35,56 persen dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 1,43 trilyun rupiah menjadi 1,95 trilyun rupiah. Akan tetapi dengan rasio PAD terhadap total pendapatan yang hanya mencapai 9,17 persen menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota masih rendah dan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. (Diolah dari Tabel 19).

Dari lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki rasio kemandirian tertinggi yaitu 29,44 persen sementara Kabupaten Tanggamus rasio kemandirian paling rendah yaitu 3,03. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kemandirian daerah yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Tingginya kemandirian Kota Bandar Lampung disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah. (Gambar 3.3).

**Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2017**



Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

### 3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2017 meningkatkan kontribusi belanja tidak langsung dari 56,40 persen tahun 2016 menjadi 57,21 persen. Sementara itu, untuk belanja langsung pemerintah kabupaten/kota justru mengurangi kontribusinya dari 43,60 persen tahun 2016 menjadi 42,79 persen tahun 2017. Dari Tabel 3.5, pemerintah kabupaten/kota mengurangi rasio belanja pegawai terhadap total belanja menjadi 1,41 persen dari 3,29 persen tahun 2017. Hal ini menunjukkan pemerintah kabupaten/kota mulai mengurangi alokasi dananya untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur negara. Sehingga tujuan adanya pemekaran wilayah untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mudah dicapai.

**Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2016-2017**

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>56,40</b>	<b>57,21</b>
Belanja Pegawai	43,49	38,24
Belanja Bunga	0,04	0,00
Belanja Subsidi	0,01	0,00
Belanja Hibah	1,63	1,43
Belanja Bantuan Sosial	0,22	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,05	3,73
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10,92	13,49
Belanja Tidak Terduga	0,04	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>43,60</b>	<b>42,79</b>
Belanja Pegawai	3,29	1,41
Belanja Barang dan Jasa	16,74	18,90
Belanja Modal	23,57	22,49

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

### 3.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah Provinsi Lampung

Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya

kebelanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Andaiyani (2013) menyatakan bahwa kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik mempengaruhi besarnya belanja modal. Sehingga pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatnya alokasi belanja modal daerah. Selama tahun 2016 hingga 2017, pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada PDRB menurut pengeluaran Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 85,46 miliar rupiah (30,51 persen dari PDRB) pada tahun 2016 menjadi 97,35 miliar rupiah (31,56 persen dari PDRB) pada tahun 2017 dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 31,16 persen. (BPS Provinsi Lampung, 2018).

# **TABEL – TABEL**

## **LAMPIRAN**

<https://lampiranbps.go.id>





**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5 588 722 511,30</b>	<b>6 813 755 009,49</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2 368 796 251,25</b>	<b>2 750 596 478,33</b>
Pajak Daerah	2 051 836 519,46	2 451 408 220,07
Retribusi Daerah	7 184 465,98	7 322 619,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26 696 866,02	27 522 159,55
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	283 078 399,78	264 343 479,70
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>3 158 712 900,54</b>	<b>2 643 744 659,46</b>
Bagi Hasil Pajak	145 745 610,06	249 340 043,38
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	39 730 387,36	0,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	1 321 679 032,00	144 778 671,12
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	1 651 557 871,13	104 561 372,26
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>61 213 359,52</b>	<b>1 851 595 354,00</b>
Pendapatan Hibah	10 426 215,52	542 809 262,08
Dana Darurat	0,00	1 419 413 871,70
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	10 374 402,20
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40 671 144,00	7 500 000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10 116 000,00	16 765 434,40
Lain-lain	0,00	1 384 774 035,10

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

**Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>5 476 921 595,65</b>	<b>7 030 414 965,23</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3 337 212 484,34</b>	<b>4 211 701 803,87</b>
Belanja Pegawai	743 620 265,32	1 716 477 159,14
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	1 450 803 387,99	1 288 548 794,36
Belanja Bantuan Sosial	2 587 280,00	4 509 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 089 846 007,46	1 099 724 703,78
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	46 368 543,58	81 576 898,10
Belanja Tidak Terduga	3 987 000,00	20 865 248,50
<b>Belanja Langsung</b>	<b>2 139 709 111,31</b>	<b>2 818 713 161,36</b>
Belanja Pegawai	95 685 683,12	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1 038 243 623,01	1 367 228 488,66
Belanja Modal	1 005 779 805,18	1 451 484 672,70

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

**Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>92 511 594,86</b>	<b>189 312 510,50</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>102 511 594,86</b>	<b>204 312 510,50</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	102 511 594,86	204 312 510,50
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	15 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	10 000 000,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>204 312 510,50</b>	<b>( 27 347 445,24)</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

**Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 020 799 729,00</b>	<b>1 069 095 669,90</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>49 078 912,00</b>	<b>82 125 266,37</b>
Pajak Daerah	8 076 435,00	10 144 981,62
Retribusi Daerah	1 562 973,00	1 887 059,29
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 600 963,00	3 213 618,61
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35 838 541,00	66 879 606,85
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>826 678 258,00</b>	<b>773 064 817,36</b>
Bagi Hasil Pajak	18 651 077,00	12 200 142,37
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4 423 669,00	17 380 656,97
Dana Alokasi Umum ( DAU )	523 586 535,00	519 160 196,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	280 016 977,00	224 323 822,02
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>145 042 559,00</b>	<b>213 905 586,18</b>
Pendapatan Hibah	6 469 105,00	54 009 539,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	57 144 647,00	56 267 227,18
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	81 428 807,00	103 628 820,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 451 799 162,93</b>	<b>1 565 897 169,14</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>23 712 889,21</b>	<b>56 177 617,87</b>
Pajak Daerah	11 379 408,14	16 846 967,78
Retribusi Daerah	1 231 183,97	1 163 556,12
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 849 869,77	3 718 487,86
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7 252 427,33	34 448 606,12
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 136 754 251,17</b>	<b>1 130 001 624,79</b>
Bagi Hasil Pajak	18 769 628,50	27 788 689,33
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	33 974 189,54	30 893 964,57
Dana Alokasi Umum ( DAU )	789 442 526,00	775 574 559,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	294 567 907,13	295 744 411,89
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>291 332 022,56</b>	<b>379 717 926,48</b>
Pendapatan Hibah	3 101 547,82	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	70 998 178,24	71 622 322,02
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	217 232 296,50	308 095 604,47

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 825 308 495,32</b>	<b>2 075 494 140,05</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>184 063 778,38</b>	<b>206 061 231,20</b>
Pajak Daerah	51 372 622,42	78 131 730,07
Retribusi Daerah	10 765 879,00	5 700 320,79
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 901 534,72	6 173 848,53
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	115 023 742,24	116 055 331,81
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 372 433 101,82</b>	<b>1 286 922 564,04</b>
Bagi Hasil Pajak	33 964 702,91	37 257 441,07
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	1 031 445 915,00	1 012 255 482,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	307 022 483,92	237 409 640,97
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>268 811 615,12</b>	<b>582 510 344,81</b>
Pendapatan Hibah	8 395 261,62	99 359 488,60
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	95 262 086,83	98 774 749,63
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	165 154 266,67	384 376 106,59
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 916 378 911,95</b>	<b>2 017 146 758,94</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>94 924 247,67</b>	<b>207 235 268,58</b>
Pajak Daerah	29 685 570,23	39 718 721,29
Retribusi Daerah	4 831 882,44	5 058 720,70
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 829 118,62	2 282 977,08
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58 577 676,39	160 174 849,51
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 555 333 164,80</b>	<b>1 489 412 947,93</b>
Bagi Hasil Pajak	55 840 963,79	82 280 387,54
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 184 823,41	0,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	1 081 165 467,00	1 062 555 526,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	410 141 910,60	344 577 034,39
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>266 121 499,49</b>	<b>320 498 542,44</b>
Pendapatan Hibah	103 075,00	274 429,50
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	95 082 213,49	102 581 764,94
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	170 936 211,00	217 642 348,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2 269 083 164,82</b>	<b>2 349 373 634,77</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>137 871 550,59</b>	<b>147 048 201,16</b>
Pajak Daerah	50 161 556,15	63 604 185,08
Retribusi Daerah	4 687 317,32	4 845 199,29
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 431 338,69	5 425 023,30
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76 591 338,43	73 173 793,49
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 825 749 300,39</b>	<b>1 722 465 741,92</b>
Bagi Hasil Pajak	44 076 543,83	56 056 783,41
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 827 849,08	0,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	1 341 242 293,00	1 317 680 979,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	434 602 614,48	348 727 979,51
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>305 462 313,83</b>	<b>479 859 691,68</b>
Pendapatan Hibah	1 147 641,79	886 018,88
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	114 717 348,83	109 070 447,81
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	189 589 571,00	241 434 963,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	7 752,22	128 468 262,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



**Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 564 629 091,44</b>	<b>1 703 964 808,23</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>98 607 164,91</b>	<b>103 970 703,71</b>
Pajak Daerah	18 643 476,07	22 572 848,96
Retribusi Daerah	2 681 424,97	1 922 881,42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 850 477,59	7 372 873,37
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70 431 786,28	72 102 099,96
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 238 244 753,56</b>	<b>1 246 229 672,49</b>
Bagi Hasil Pajak	25 692 018,96	37 548 261,41
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 936 557,54	0,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	960 294 182,00	945 025 570,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	246 321 995,07	263 655 841,08
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>227 777 172,97</b>	<b>353 764 432,02</b>
Pendapatan Hibah	0,00	71 251 400,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	80 535 342,97	84 991 975,59
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	147 120 370,00	195 028 192,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	121 460,00	2 492 864,44

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 164 839 362,14</b>	<b>1 340 655 509,81</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>44 346 945,47</b>	<b>49 551 283,41</b>
Pajak Daerah	10 650 926,84	15 182 720,24
Retribusi Daerah	1 015 768,54	886 384,80
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 743 449,98	3 117 487,41
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29 936 800,12	30 364 690,95
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>908 456 210,69</b>	<b>1 034 484 642,82</b>
Bagi Hasil Pajak	28 750 608,69	36 780 923,13
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	656 605 460,00	650 838 237,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	223 100 142,00	346 865 482,69
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>212 036 205,98</b>	<b>256 619 583,59</b>
Pendapatan Hibah	0,00	9 000 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	69 784 937,18	65 358 337,59
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	142 172 112,00	182 260 346,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	79 156,80	900,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 141 982 285,69</b>	<b>1 160 317 938,79</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>26 416 719,39</b>	<b>40 931 506,76</b>
Pajak Daerah	14 107 628,35	20 788 976,11
Retribusi Daerah	2 301 230,46	1 628 987,03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 612 546,64	3 047 289,32
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6 395 313,94	15 466 254,31
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>861 646 584,00</b>	<b>825 407 650,78</b>
Bagi Hasil Pajak	28 149 261,55	21 789 653,17
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 147 451,10	14 469 873,03
Dana Alokasi Umum ( DAU )	614 655 240,00	599 655 961,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	212 694 631,35	189 492 163,58
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>253 918 982,30</b>	<b>293 978 781,25</b>
Pendapatan Hibah	10 000 000,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	145 802 978,49	121 733 355,28
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	4 000 000,00
Lainnya	98 116 003,82	168 245 425,97

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 186 433 984,70</b>	<b>1 328 402 245,76</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>41 956 848,58</b>	<b>50 150 346,62</b>
Pajak Daerah	12 939 031,80	21 036 338,21
Retribusi Daerah	1 694 994,10	4 212 285,55
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	262 210,50	318 037,55
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27 060 612,18	24 583 685,32
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>903 421 879,77</b>	<b>930 162 730,63</b>
Bagi Hasil Pajak	23 079 713,77	28 115 458,96
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	675 736 319,00	668 378 478,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	204 605 847,00	233 668 793,67
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>241 055 256,34</b>	<b>348 089 168,50</b>
Pendapatan Hibah	2 163 443,98	63 576 390,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	63 072 246,54	61 132 280,05
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	175 819 565,82	223 380 498,45
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 122 575 427,77</b>	<b>1 194 493 674,54</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>68 157 777,77</b>	<b>73 405 027,12</b>
Pajak Daerah	15 582 621,37	17 935 953,76
Retribusi Daerah	3 181 924,37	2 845 430,51
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	626 298,95	836 477,51
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48 766 933,07	51 787 165,35
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>915 045 562,00</b>	<b>860 970 139,91</b>
Bagi Hasil Pajak	14 263 969,00	27 852 208,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 441 553,00	0,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	633 088 784,00	621 967 450,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	262 251 256,00	211 150 481,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>139 372 088,00</b>	<b>260 118 507,51</b>
Pendapatan Hibah	1 569 206,00	687 547,45
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	59 920 427,00	62 288 021,42
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	53 167 797,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	77 882 455,00	143 975 141,64

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>729 684 071,89</b>	<b>729 684 071,89</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>27 783 046,53</b>	<b>22 114 016,97</b>
Pajak Daerah	4 434 683,12	7 373 015,84
Retribusi Daerah	3 040 365,95	1 366 932,44
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 252 597,91	1 056 603,17
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19 055 399,55	12 317 465,52
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>553 241 305,82</b>	<b>577 752 823,93</b>
Bagi Hasil Pajak	23 512 826,70	17 608 516,75
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		17 168 527,59
Dana Alokasi Umum ( DAU )	447 672 298,00	444 344 769,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	82 056 181,12	98 631 010,59
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>148 659 719,55</b>	<b>148 772 525,62</b>
Pendapatan Hibah	0,00	9 500 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	52 822 880,46	48 171 044,31
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	22 079 780,25	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	73 757 058,84	91 101 481,31

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>865 796 622,42</b>	<b>902 466 887,83</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>20 882 974,14</b>	<b>97 387 117,99</b>
Pajak Daerah	8 161 566,34	10 351 676,92
Retribusi Daerah	1 339 636,53	1 970 729,20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 472 186,68	1 558 804,22
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9 909 584,59	83 505 907,65
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>715 823 633,66</b>	<b>670 846 172,72</b>
Bagi Hasil Pajak	19 215 089,75	22 467 717,31
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		14 124 870,96
Dana Alokasi Umum ( DAU )	464 431 679,00	459 231 176,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	232 176 864,92	175 022 408,44
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>129 090 014,62</b>	<b>134 233 597,11</b>
Pendapatan Hibah	9 019 395,41	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	55 836 952,20	44 138 406,35
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5 000 000,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	59 233 667,00	90 095 190,76

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>738 441 026,00</b>	<b>813 113 164,46</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>20 710 862,00</b>	<b>42 895 150,22</b>
Pajak Daerah	3 856 123,00	5 101 054,61
Retribusi Daerah	8 185 158,00	2 499 888,78
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8 669 581,00	35 294 206,82
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>594 201 362,00</b>	<b>596 175 229,65</b>
Bagi Hasil Pajak	16 395 731,00	12 066 179,34
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	14 138 665,04
Dana Alokasi Umum ( DAU )	413 299 797,00	410 991 252,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	164 505 834,00	191 580 410,20
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>123 528 802,00</b>	<b>141 441 507,66</b>
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	51 348 160,00	48 798 737,21
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	72 180 642,00	92 642 770,46

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



**Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2 057 086 652,01</b>	<b>2 081 420 040,06</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>483 379 398,03</b>	<b>612 809 681,25</b>
Pajak Daerah	324 667 322,50	373 764 303,00
Retribusi Daerah	49 653 325,82	28 256 993,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 886 472,35	13 062 932,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	98 172 277,36	197 725 453,25
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 376 175 794,39</b>	<b>1 408 084 148,00</b>
Bagi Hasil Pajak	58 853 611,60	52 149 891,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	14 367 285,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	1 053 232 762,00	1 034 730 849,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	264 089 420,79	306 836 123,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>197 531 459,59</b>	<b>60 526 210,81</b>
Pendapatan Hibah	95 425 681,18	4 500 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	97 105 778,41	48 526 210,81
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	5 000 000,00	7 500 000,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>868 453 605,46</b>	<b>893 181 351,22</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>113 989 941,27</b>	<b>154 652 520,65</b>
Pajak Daerah	14 281 738,65	18 209 276,44
Retribusi Daerah	6 156 855,00	6 108 016,99
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 418 100,71	3 902 898,39
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89 133 246,91	126 432 328,83
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>683 788 519,39</b>	<b>680 266 516,20</b>
Bagi Hasil Pajak	24 735 231,94	16 633 197,11
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	14 124 870,96
Dana Alokasi Umum ( DAU )	463 881 055,00	453 830 037,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	195 172 232,46	195 678 411,13
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>70 675 144,80</b>	<b>58 262 314,36</b>
Pendapatan Hibah	5 000 000,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	56 511 746,36	48 091 147,33
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5 156 819,00	7 500 000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	4 006 579,44	2 671 167,03

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>19 923 291 593,54</b>	<b>22 855 957 643,36</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1 435 883 055,93</b>	<b>3 591 411 500,15</b>
Pajak Daerah	578 000 709,97	720 762 749,94
Retribusi Daerah	102 329 919,47	70 353 385,90
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	54 737 166,11	55 087 358,31
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	700 815 260,39	1 100 311 445,75
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>15 466 993 681,46</b>	<b>15 232 247 423,16</b>
Bagi Hasil Pajak	433 950 978,97	488 595 449,91
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	69 936 092,67	136 668 714,12
Dana Alokasi Umum ( DAU )	11 149 780 312,00	10 976 220 521,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	3 813 326 297,82	3 663 364 014,16
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3 020 414 856,15</b>	<b>4 032 298 720,05</b>
Pendapatan Hibah	142 394 357,79	313 044 813,43
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	1 165 945 924,01	1 071 546 027,51
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1 104 457 502,74	1 608 419 071,04
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	4 000 000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	607 617 071,61	1 035 288 808,08

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 20. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>999 084 484,00</b>	<b>1 122 380 535,13</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>493 588 977,00</b>	<b>557 581 883,66</b>
Belanja Pegawai	354 894 785,00	374 085 523,13
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	26 527 966,00	21 326 186,14
Belanja Bantuan Sosial	100 000,00	100 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	726 872,00	1 077 477,10
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	110 494 692,00	159 871 619,38
Belanja Tidak Terduga	844 662,00	1 121 077,92
<b>Belanja Langsung</b>	<b>505 495 507,00</b>	<b>564 798 651,47</b>
Belanja Pegawai	41 601 822,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	153 830 334,00	216 129 629,67
Belanja Modal	310 063 351,00	348 669 021,80

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 21. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 358 575 195,29</b>	<b>1 547 099 699,35</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>814 017 389,89</b>	<b>1 067 420 863,00</b>
Belanja Pegawai	571 573 141,80	705 140 873,53
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	26 305 994,80	31 690 799,63
Belanja Bantuan Sosial	1 873 542,00	220 700,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	1 259 715,53
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	211 908 976,54	327 823 068,94
Belanja Tidak Terduga	2 355 734,75	1 285 705,37
<b>Belanja Langsung</b>	<b>544 557 805,40</b>	<b>479 678 836,35</b>
Belanja Pegawai	67 081 852,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	249 494 971,38	230 922 441,43
Belanja Modal	227 980 982,03	248 756 394,92

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 22. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 864 084 864,27</b>	<b>2 072 367 515,80</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 133 786 295,76</b>	<b>1 198 325 948,64</b>
Belanja Pegawai	891 302 380,41	843 648 266,46
Belanja Bunga	5 407 149,41	9 065 328,63
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	11 949 695,00	22 154 377,60
Belanja Bantuan Sosial	0,00	329 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	3 536 821,55
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	224 877 759,94	319 084 082,91
Belanja Tidak Terduga	249 311,00	508 071,50
<b>Belanja Langsung</b>	<b>730 298 568,51</b>	<b>874 041 567,16</b>
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	260 176 552,21	334 386 211,95
Belanja Modal	470 122 016,31	539 655 355,21

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 23. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 922 657 369,46</b>	<b>1 947 093 864,02</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 223 293 106,90</b>	<b>1 282 427 545,40</b>
Belanja Pegawai	895 178 247,85	893 744 249,06
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	32 895 195,25	40 751 315,28
Belanja Bantuan Sosial	25 000,00	2 144 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	6 525 808,66
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	294 957 890,70	339 148 652,40
Belanja Tidak Terduga	236 773,10	113 520,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>699 364 262,55</b>	<b>664 666 318,62</b>
Belanja Pegawai	62 095 383,29	0,00
Belanja Barang dan Jasa	273 185 492,10	343 119 078,27
Belanja Modal	364 083 387,17	321 547 240,35

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 24. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>2 274 041 706,31</b>	<b>2 879 206 072,22</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 440 949 069,38</b>	<b>1 939 287 756,15</b>
Belanja Pegawai	1 158 978 551,11	1 119 489 083,17
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	21 317 288,13	38 377 388,93
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5 494 565,43	393 498 448,65
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	254 730 020,96	387 922 835,40
Belanja Tidak Terduga	428 643,75	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>833 092 636,93</b>	<b>939 918 316,07</b>
Belanja Pegawai	54 599 536,57	0,00
Belanja Barang dan Jasa	355 873 960,89	484 969 333,54
Belanja Modal	422 619 139,47	454 948 982,53

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



**Tabel 25. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 634 691 696,23</b>	<b>1 800 605 956,17</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>963 158 453,97</b>	<b>1 081 942 389,86</b>
Belanja Pegawai	777 143 513,40	820 370 931,97
Belanja Bunga	0,00	1 158 700,56
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	11 069 837,00	28 854 900,00
Belanja Bantuan Sosial	4 649 688,63	8 341 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	182 552,94	207 251,72
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	168 918 362,00	221 769 908,00
Belanja Tidak Terduga	1 194 500,00	1 239 697,60
<b>Belanja Langsung</b>	<b>671 533 242,27</b>	<b>718 663 566,31</b>
Belanja Pegawai	79 449 354,30	0,00
Belanja Barang dan Jasa	243 293 112,28	318 542 286,34
Belanja Modal	348 790 775,69	400 121 279,97

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 26. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 180 257 690,47</b>	<b>1 596 268 484,17</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>679 950 056,54</b>	<b>965 927 760,57</b>
Belanja Pegawai	488 214 263,34	458 573 187,13
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	16 084 769,00	12 366 400,00
Belanja Bantuan Sosial	2 688 500,00	2 987 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	781 000,00	246 346 836,72
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	171 979 024,20	245 546 836,72
Belanja Tidak Terduga	202 500,00	107 000,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>500 307 633,92</b>	<b>630 340 723,60</b>
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	222 470 666,68	273 442 298,88
Belanja Modal	277 836 967,24	356 898 424,72

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 27. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 132 055 773,83</b>	<b>1 148 944 548,99</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>560 178 555,68</b>	<b>585 217 011,48</b>
Belanja Pegawai	370 416 419,02	375 522 516,91
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	1 593 067,31	1 598 196,70
Belanja Hibah	42 255 750,00	23 377 185,00
Belanja Bantuan Sosial	279 500,00	422 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	145 633 819,35	184 297 112,88
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>571 877 218,16</b>	<b>563 727 537,51</b>
Belanja Pegawai	48 623 348,25	55 645 552,10
Belanja Barang dan Jasa	201 632 181,03	252 270 767,86
Belanja Modal	321 621 688,87	255 811 217,54

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 28. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 212 984 685,38</b>	<b>1 469 417 438,30</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>688 910 372,94</b>	<b>916 545 062,65</b>
Belanja Pegawai	545 836 889,64	524 339 666,39
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	13 163 371,25	11 330 400,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 450 950,00	190 461 952,09
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	128 459 162,04	188 490 962,09
Belanja Tidak Terduga	0,00	1 922 082,08
<b>Belanja Langsung</b>	<b>524 074 312,44</b>	<b>552 872 375,65</b>
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	182 398 740,69	225 326 408,63
Belanja Modal	341 675 571,75	327 545 967,01

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 29. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 188 366 264,00</b>	<b>1 183 049 916,58</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>701 670 744,00</b>	<b>688 232 267,87</b>
Belanja Pegawai	523 114 403,00	504 919 051,93
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	33 188 200,00	14 795 003,00
Belanja Bantuan Sosial	523 000,00	729 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	875 138,14
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	144 845 141,00	166 914 074,79
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>486 695 520,00</b>	<b>494 817 648,71</b>
Belanja Pegawai	32 864 860,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	167 922 124,00	219 455 091,85
Belanja Modal	285 908 536,00	275 362 556,87

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 30. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>735 747 182,49</b>	<b>689 748 346,90</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>367 472 325,60</b>	<b>334 128 359,05</b>
Belanja Pegawai	185 456 108,96	181 182 511,88
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	24 437 084,99	5 498 387,33
Belanja Bantuan Sosial	29 105 000,00	15 235 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	433 172,29	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	127 885 959,35	132 069 059,84
Belanja Tidak Terduga	155 000,00	143 400,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>368 274 856,89</b>	<b>355 619 987,85</b>
Belanja Pegawai	49 323 439,25	47 982 462,60
Belanja Barang dan Jasa	123 439 817,89	139 167 179,55
Belanja Modal	195 511 599,75	168 470 345,71

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 31. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>866 860 221,17</b>	<b>1 350 721 647,45</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>353 345 011,45</b>	<b>714 278 156,79</b>
Belanja Pegawai	260 001 049,62	452 470 420,07
Belanja Bunga	0,00	12 366 400,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	20 931 283,05	
Belanja Bantuan Sosial	310 000,00	2 987 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	330 968,23	800 000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	71 771 710,56	245 546 836,72
Belanja Tidak Terduga	0,00	107 000,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>513 515 209,72</b>	<b>636 443 490,66</b>
Belanja Pegawai	40 139 763,51	6 102 767,06
Belanja Barang dan Jasa	169 348 384,11	273 442 298,88
Belanja Modal	304 027 062,09	356 898 424,72

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 32. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>724 060 709,00</b>	<b>811 738 309,03</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>284 272 887,00</b>	<b>323 026 153,20</b>
Belanja Pegawai	176 919 667,00	170 107 362,23
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	9 451 197,00	13 581 840,00
Belanja Bantuan Sosial	1 848 200,00	1 617 175,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	476 607,00	542 960,50
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	95 492 432,00	136 815 049,73
Belanja Tidak Terduga	84 784,00	361 765,75
<b>Belanja Langsung</b>	<b>439 787 822,00</b>	<b>488 712 155,83</b>
Belanja Pegawai	11 458 128,00	40 890 871,47
Belanja Barang dan Jasa	97 768 855,00	133 579 037,09
Belanja Modal	330 560 839,00	314 242 247,26

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



**Tabel 33. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 755 858 575,28</b>	<b>2 207 777 629,00</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 033 425 230,16</b>	<b>1 003 335 519,00</b>
Belanja Pegawai	996 238 369,85	942 773 373,00
Belanja Bunga	2 520 236,27	3 782 147,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	29 436 203,85	52 529 492,00
Belanja Bantuan Sosial	2 545 000,00	2 576 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 078 654,00	1 171 220,00
Belanja Tidak Terduga	1 606 766,20	503 287,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>722 433 345,12</b>	<b>1 204 442 110,00</b>
Belanja Pegawai	128 778 385,73	130 649 351,00
Belanja Barang dan Jasa	394 447 506,84	570 506 842,74
Belanja Modal	199 207 452,55	503 285 916,26

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 34. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>875 876 415,20</b>	<b>839 004 712,63</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>386 075 153,33</b>	<b>308 320 469,35</b>
Belanja Pegawai	383 749 073,47	300 117 614,09
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	1 587 600,00	7 163 093,31
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	738 479,86	738 480,85
Belanja Tidak Terduga	0,00	301 281,10
<b>Belanja Langsung</b>	<b>489 801 261,86</b>	<b>530 684 243,29</b>
Belanja Pegawai	33 271 768,58	37 694 213,01
Belanja Barang dan Jasa	207 482 958,85	268 098 397,29
Belanja Modal	249 046 534,44	224 891 632,99

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 35. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>19 725 202 832,37</b>	<b>22 665 424 675,74</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>11 124 093 629,59</b>	<b>12 965 997 146,67</b>
Belanja Pegawai	8 579 016 863,47	8 666 484 630,94
Belanja Bunga	7 927 385,68	26 372 576,19
Belanja Subsidi	1 593 067,31	1 598 196,70
Belanja Hibah	320 601 435,32	323 796 768,21
Belanja Bantuan Sosial	43 947 430,63	37 688 875,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9 876 687,90	845 132 410,67
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2 153 772 084,50	3 057 209 800,66
Belanja Tidak Terduga	7 358 674,80	7 713 888,32
<b>Belanja Langsung</b>	<b>8 601 109 202,78</b>	<b>9 699 427 529,07</b>
Belanja Pegawai	649 287 641,48	318 965 217,24
Belanja Barang dan Jasa	3 302 765 657,94	4 283 357 303,96
Belanja Modal	4 649 055 903,36	5 097 105 007,86

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 36. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>61 520 028,00</b>	<b>80 835 274,35</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>69 494 028,00</b>	<b>83 235 274,35</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	69 494 028,00	83 235 274,35
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>7 974 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7 950 000,00	2 400 000,00
Pembayaran Pokok Utang	24 000,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>83 235 273,00</b>	<b>27 550 409,11</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 37. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>( 96 281 736,93)</b>	<b>( 2 582 712,71)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>19 750 102,98</b>	<b>5 293 950,20</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	19 750 102,98	5 293 950,20
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>116 031 839,90</b>	<b>7 876 662,90</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3 401 547,82	0,00
Pembayaran Pokok Utang	112 630 292,09	7 876 662,90
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>3 057 769,29</b>	<b>(16 214 757)</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 38. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan  
2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>178 800 254,09</b>	<b>107 460 386,28</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>211 830 661,08</b>	<b>140 023 885,14</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	138 986 079,28	140 023 885,14
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	72 738 167,80	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	106 414,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>33 030 406,98</b>	<b>32 563 498,86</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10 395 261,62	7 970 664,06
Pembayaran Pokok Utang	22 635 145,37	24 592 834,80
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>140 023 885,14</b>	<b>110 587 010,53</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 39. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>37 572 067,21</b>	<b>30 913 866,17</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>37 572 067,21</b>	<b>30 913 866,17</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	37 572 067,21	30 913 866,17
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>31 293 609,71</b>	<b>100 966 761,09</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 40. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah  
2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>202 582 627,82</b>	<b>197 624 086,33</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>231 732 692,02</b>	<b>197 624 086,33</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7 608 201,99	197 624 086,33
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	224 124 490,03	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>29 150 064,20</b>	<b>0,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	29 150 064,20	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>197 624 086,33</b>	<b>( 332 208 351,12)</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



**Tabel 41. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>95 152 163,13</b>	<b>130 392 600,52</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>113 587 322,83</b>	<b>130 392 600,52</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	113 587 322,83	130 392 600,52
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>18 435 159,70</b>	<b>0,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 672 026,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	16 763 133,70	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>25 089 558,34</b>	<b>33 751 452,58</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 42. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>51 669 508,14</b>	<b>35 251 179,82</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>65 494 894,09</b>	<b>36 251 179,82</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65 494 894,09	36 251 179,82
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>13 825 385,95</b>	<b>1 000 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	1 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	12 825 385,95	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>36 251 179,82</b>	<b>( 220 361 794,54)</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 43. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>13 782 350,90</b>	<b>23 708 862,76</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>14 247 200,64</b>	<b>23 708 862,76</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	14 247 200,64	23 708 862,76
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>464 849,74</b>	<b>0,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	464 849,74	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>23 708 862,76</b>	<b>35 082 252,56</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 44. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>40 184 237,02</b>	<b>12 137 286,34</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>65 381 228,47</b>	<b>13 637 286,34</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65 381 228,47	13 637 286,34
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>25 196 991,45</b>	<b>1 500 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	250 000,00	1 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	24 946 991,45	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>13 633 536,34</b>	<b>( 128 877 906,20)</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 45. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>100 091 366,00</b>	<b>32 681 006,63</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>101 591 366,00</b>	<b>34 681 006,63</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	101 591 366,00	34 681 006,63
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 500 000,00	2 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>34 300 529,77</b>	<b>44 124 764,60</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 46. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>32 613 456,70</b>	<b>23 080 265,89</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>45 781 958,10</b>	<b>39 792 551,10</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45 781 958,10	26 550 347,10
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	13 242 204,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>13 168 501,41</b>	<b>16 712 285,22</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	13 168 501,41	15 212 285,22
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>26 550 346,10</b>	<b>81 971 285,51</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 47. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>3 338 460,70</b>	<b>3 042 580,15</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>27 293 523,74</b>	<b>5 042 580,15</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26 866 827,58	20 192 929 464,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	598 000,00	522 300,00
Lainnya	171 303,84	2 500 987,20
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>23 955 063,04</b>	<b>2 000 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	2 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	22 955 063,04	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>2 274 861,95</b>	<b>23 215 611,16</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 48. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>78 565 102,00</b>	<b>79 796 752,55</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>79 065 102,00</b>	<b>84 296 752,55</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	79 065 102,00	84 296 752,55
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500 000,00	4 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>92 945 419,00</b>	<b>813 113 164,46</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



**Tabel 49. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2016-2017**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>( 281 450 645,38)</b>	<b>172 826 175,00</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>24 563 686,31</b>	<b>12 065 074,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	24 563 686,31	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	160 761 101,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>306 014 331,69</b>	<b>36 059 763,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	95 425 681,18	13 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	210 588 650,51	22 559 763,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>19 777 431,34</b>	<b>10 408 823,06</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 50. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>61 025 483,18</b>	<b>53 656 413,16</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>61 025 483,18</b>	<b>53 602 673,45</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60 968 754,72	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	53 739,71
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	56 728,46	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>53 602 673,45</b>	<b>106 333 051,75</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
2016-2017**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>355 211 536,40</b>	<b>21 068 506 683,83</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>944 458 130,46</b>	<b>21 176 618 893,82</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	870 958 820,21	20 999 538 561,90
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	160 761 101,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	72 738 167,80	53 739,71
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	163 142,46	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	598 000,00	13 764 504,00
Lainnya	224 295 793,87	2 500 987,20
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>589 246 594,06</b>	<b>108 112 209,98</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	123 559 366,35	37 870 664,06
Pembayaran Pokok Utang	465 687 227,71	70 241 545,92
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>783 369 022,33</b>	<b>2 084 767 395,36</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



# **GAMBAR LAMPIRAN**

<https://lampiranbps.go.id>





# APBD

PROVINSI LAMPUNG

2017

## REALISASI PENERIMAAN

APBD 2017 **NAIK 3,09 %**  
DARI YANG DIANGGARKAN



## REALISASI PENGELUARAN APBD 2017

**NAIK 3,49 %**  
DARI YANG  
DIANGGARKAN



## BELANJA LANGSUNG

MENINGKAT **20,39 %**  
DARI ANGGARAN  
2017



## BELANJA TIDAK LANGSUNG

TURUN **5,6 %** DARI  
ANGGARAN  
2017

**SILPA**  
REALISASI APBD  
2017 DEFISIT  
**Rp. 27,35**  
MILYAR

## REALISASI PAD



**NAIK**

**16,12 %**  
DIBANDINGKAN  
TAHUN 2016





## DAFTAR PUSTAKA

Andaiyani. 2013. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 1(1).

BPS Provinsi Lampung. 2018. PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran 2013-2017.

<https://lampung.bps.go.id>



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://lampung.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung, 35215

Telp. (0721) 482909 Fax. (0721) 484329

Email: [bps1800@bps.go.id](mailto:bps1800@bps.go.id), Website: <http://lampung.bps.go.id>

